# PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
## (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2010-2014)

**Oleh:**
**Wulan Sari**
**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
**Universitas Komputer Indonesia**
**Jl. Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132**
**Email: wulan_febriani@rocketmail.com**

*ABSTRACT*

*The Problem that occur on the Value Added Tax Receipts is, for the whole of the tax receipts, the lowest is the Value Added Tax Receipts, on the tax collection with force letter is, detention to taxpayer because of the tax collection with force letter is not enough effective and on the tax audit is, the result of tax audit SKPKB is increase and become lawsuit.*

*The purpose of this research is to determine how much the influence partially of Tax Collection with Force Letter and Tax Audit to the Value Added Tax Receipts.*

*Method that used is descriptive and verificative analysis. The analysis method that used is multiple linear regression analysis. The population in this study are 10 years data from Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. The sampling technique uses purposive sampling method. The number of samples are 5 years data per a month (2010-2014).*

*The result of this research is, there is the influence significantly between Tax Collection with Force Letter and Tax Audit partially to the Value Added Tax Receipts.*

***Keywords:*** *Tax Collection with Force Letter, Tax Audit, the Value Added Tax Receipts.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang – Undang 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, setiap kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu setiap masa pajak Pengusaha Kena Pajak harus memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai-nya.

Dirjen Pajak mengatakan bahwa realisasi penerimaan PPh Tahun 2011 mencapai 99,8% dari target sebesar Rp 431,97 triliun, penerimaan PPN dan PPnBM mencapai 93,06% dari target sebesar Rp 298,44 triliun, serta penerimaan PBB mencapai 102,86% dari target sebesar Rp 29,05 triliun. Dari keseluruhan pencapaian target penerimaan pajak, maka yang paling rendah pencapaiannya adalah penerimaan PPN. Rendahnya penerimaan PPN menurut Dirjen Pajak disebabkan rendahnya kepatuhan penyetoran PPN di sektor retail (Fuad Rahmany, 2012).

Masalah lain dikemukakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), mengatakan dari data Ditjen Pajak, sepanjang semester I 2015, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 13,18 persen atau sebesar Rp 74,179 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 85,433 triliun kemudian penurunan penerimaan PPN Dalam Negeri 0,46 persen atau sebesar Rp 120,534 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 121,040 triliun (Bambang Brodjonegoro, 2015).

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak mengatakan, penyanderaan dilakukan terhadap direktur PT ESI, dikarenakan PT ESI selaku Wajib Pajak (WP) tidak merespon atas semua upaya penagihan persuasif. Edi menjelaskan padahal sebelum melakukan penyanderaan mereka telah melakukan segala upaya, yakni melayangkan surat teguran dan surat paksa. Lalu dilanjutkan dengan penyitaan aset, pemblokiran rekening sampai pencegahan bepergian ke luar negeri, tetapi PT ESI tetap tidak menanggapinya (Edi Slamet Irianto, 2016).

Permasalahan terkait pemeriksaan pajak mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

(SKPKB) yaitu Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dilihat dari 2011 hingga 2015 mencapai Rp 225,12 triliun, dan ada peningkatan 75,3 persen dari 2014 hingga 2015. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan pemberitahuan yang dikeluarkan Ditjen Pajak mengenai besarnya jumlah pokok pajak, kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak. Selain itu, 70 persen dari total sengketa atas hasil pemeriksaan antara WP dan Ditjen Pajak adalah mengenai pembuktian kekurangan pembayaran pajak (Edi Slamet Rianto dan Irawan, 2016).

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penagihan dengan Surat Paksa ini telah dilakukan oleh Hazra Muda, dkk. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu Penagihan pajak dengan ST dan SP berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Bitung (Hazra Muda, dkk, 2015:12). Sedangkan untuk variabel pemeriksaan pajak, hasil penelitian Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati menyatakan bahwa variabel independen Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada variabel dependen penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara (Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati, 2015:15).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya".

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada April 2015 terjadi penurunan PPN Impor dan PPN Dalam Negeri.
2) Sepanjang semester I 2015, PPN Impor yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 13,18 persen atau sebesar Rp 74,179 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 85,433 triliun dan penurunan penerimaan PPN Dalam Negeri 0,46 persen atau sebesar Rp 120,534 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 121,040 triliun.
3) Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung tahun 2015 dari PPN masih belum maksimal.
4) Aturan dan metode penagihan pajak yang belum efektif.
5) Penyanderaan wajib pajak dikarenakan penagihan dengan surat paksa yang kurang efektif.
6) Hasil Pemeriksaan pajak Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) meningkat dan menjadi sengketa.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2) Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun penelitian dimaksudkan untuk mencari kebenaran untuk pemecahan masalah dan tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

### 1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk mencari kebenaran guna pemecahan masalah dalam penelitian atas pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris.

### 1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2) Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara akademis maupun praktis.

### 1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu:

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada Penerimaan PPN maupun masalah pada Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan masalah Pemeriksaan Pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada Penerimaan PPN dapat diperbaiki dengan meningkatkan penerapan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pemeriksaan Pajak.
2) Untuk masyarakat menggambarkan tingkat pemahamannya terhadap ketentuan perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak guna meningkatkan Penerimaan PPN.
3) Untuk pemerintah sebagai masukan untuk perbaikan Penagihan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak.

### 1.5.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan penelitian ini dari sisi akademis yaitu:

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta menambah ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah.
2) Ilmu pengetahuan untuk menambah referensi ilmiah mengenai masalah perpajakan yang bermanfaat pada ilmu pengetahuan dan khususnya yang akan mengadakan penelitian lanjutan dari hasil penelitian ini.

# II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

## 2.1 Kajian Pustaka

Mengkaji pustaka yang dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan konsep penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dan kajian pustaka ini terdiri dari teori-teori yang mendasari konsep yang dibangun peneliti, guna memperoleh data penelitian yang akurat, relevan dan valid.

### 2.1.1 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Mengkaji pustaka tentang penagihan pajak dengan surat paksa dimulai dari pengertian penagihan pajak dengan surat paksa, penerbitan surat paksa, pemberitahuan surat paksa, sampai indikator penagihan pajak dengan surat paksa.

#### 2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Adapun pengertian Surat Paksa menurut Mardiasmo (2013:121) adalah:

"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, surat paksa sendiri mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

#### 2.1.1.4 Indikator Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penjelasan mengenai penagihan pajak aktif menurut Erly Suandy (2011:34) adalah sebagai berikut:

Penagihan Pajak Aktif terdiri dari indikator:

1) Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
2) Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

3) Penyitaan adalah tindakan penagihan lebit lanjut setelah Surat Paksa.
4) Pelaksanaan lelang

Dalam hal Penagihan Pajak dengan Surat Paksa maka penulis mengangkat indikator yaitu Jumlah Nominal Surat Paksa untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

**2.1.2 Pemeriksaan Pajak**

Mengkaji pustaka tentang pemeriksaan pajak dimulai dari pengertian pemeriksaan pajak, unsur-unsur pemeriksaan pajak, tujuan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan pajak, jenis-jenis pemeriksaan pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, sampai indikator pemeriksaan pajak.

**2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:244) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka SAS merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan.Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem SAS yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan".

**2.1.2.7 Indikator Pemeriksaan Pajak**

Produk hukum pemeriksaan pajak menurut Rudy Suhartono dan wirawan B.Ilyas (2012:53) salah satunya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang terutang atau kurang bayar.

Dari hasil pemikiran di atas, indikator untuk pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

**2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Mengkaji pustaka tentang penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimulai dari pengertian penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, pengertian pajak masukan dan pajak keluaran, objek Pajak Pertambahan Nilai, subjek Pajak Pertambahan Nilai, cara dan metode penghitungan Pajak Pertambahan Nilai, sampai indikator penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

**2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Suprianto (2011:16), yaitu:

> "Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi".

**2.1.3.5 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Resmi (2012:5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Dari dasar pemikiran di atas maka indikator penerimaan pajak dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah hasil-hasil penerimaan atau jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

**2.2 Kerangka Pemikiran**

Penerimaan PPN menempati urutan kedua sebagai jenis pajak terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia, dan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Sampai saat ini keberadaan PPN kedudukannya penting bagi penerimaan negara (Rohmasari Sitio,2015). Namun pada kenyataannya utang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif.

**2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Konsep dan teori yang dapat menghubungkan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Rochmat Soemitro dikutip oleh Waluyo (2013:238) yaitu: "Penerimaan di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan

pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa".

### 2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Konsep dan teori yang dapat menghubungkan Pemeriksaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:248) yaitu:

> "Adapun tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak yaitu membuat Pemeriksaan menjadi efektif dan efisien, meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak, meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia, Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak".

## 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_1$: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

$H_2$: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

# III. METODE PENELITIAN

## 3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian terdiri dari prosedur, strategi dan teknik pengumpulan dan analisis data. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.

### 3.1.1 Metode-metode yang Digunakan

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2012:2) adalah sebagai berikut: "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu". Sedangkan menurut Umi Narimawati (2010:29): "Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dimana data variabel independen (X1) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, (X2) Pemeriksaan Pajak dan variabel dependen (Y) Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang memiliki skala rasio.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan para ahli, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan verifikatif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian, sedangkan metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai keterkaitan antara penagihan pajak dengan surat paksa, pemeriksaan pajak, dan penerimaan PPN.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah variabel penelitian Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pemeriksaan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya dengan unit observasi atau tempat penelitian di unit analisis yaitu pada bagian Penagihan, Pemeriksaan dan Penerimaan.

## 3.2 Operasionalisasi Variabel

Hipotesis yang diajukan diuji melalui variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut:

### 1) Variabel Independen atau Variabel Bebas

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, variabel independen (X) adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ($X_1$) dan Pemeriksaan Pajak ($X_2$). Penagihan pajak dengan surat paksa dapat dikatakan sebagai suatu wujud tindakan lanjutan setelah surat teguran guna memaksa wajib pajak yang masih menunggak pajak untuk segera melunasi utang pajaknya.

Pemeriksaan Pajak dapat dikatakan sebagai bentuk Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, bukti secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain.

**2) Variabel Dependen atau Variabel Terikat**

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis variabel dependen (Y) adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dikatakan sebagai suatu ukuran/jumlah penerimaan yang diterima negara dari salah satu jenis pajak yaitu PPN yang merupakan suatu jenis pajak tidak langsung, dikarenakan ada bentuk pengalihan pajak kepada pihak lain yaitu pembeli.

Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai operasionalisasi variabel melalui Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel.

## 3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Pada subbab ini menjelaskan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu sekunder dan primer. Dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data berupa penelitian ke lapangan dan studi kepustakaan.

### 3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer.

### 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan *(Library Research).* Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan *(Field Research*)
   Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara:

a) Observasi (Pengamatan Langsung)
b) Dokumen-dokumen

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach)*
   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku *(text book)*, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

## 3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu data 10 tahun pada Kantor Pelayanan Pajak Majalaya lalu sampel yang diambil yaitu data 5 tahun pada Kantor Pelayanan Pajak Majalaya dan tempat penelitian berada di Jalan Peta Bandung serta waktu penelitian yang akan dijabarkan pada subbab waktu penelitian.

### 3.4.1 Populasi

Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah data 10 tahun pada Kantor Pelayanan Pajak Majalaya, yaitu data jumlah nominal Surat Paksa yang terbit, jumlah nominal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang terbit dan jumlah realisasi penerimaan PPN.

### 3.4.2 Sampel

Dalam penelitian ini sampel dipilih berdasarkan *nonprobability sampling* dan *purposive sampling. NonProbability* artinya setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Teknik-teknik yang termasuk ke dalam *NonProbability* ini antara lain: Sampling Sistematis, Sampling Kuota, Sampling *Insidential*, Sampling *Purposive*, Sampling Jenuh, dan *Snowball Sampling* (Sugiyono, 2012:84). Menurut Sugiyono (2013:2018-219): "*Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini untuk variabel penagihan pajak dengan surat paksa adalah jumlah nominal Surat Paksa yang diterbitkan selama 5 tahun per bulan dan variabel pemeriksaan pajak adalah jumlah nominal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan selama 5 tahun per bulan, sedangkan sampel untuk variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai selama 5 tahun per bulan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

### 3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dituju yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dengan waktu penelitian yang telah ditentukan.

#### 3.4.3.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, Jl.Peta No.7 Bandung.

#### 3.4.3.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini waktu yang diambil adalah dari bulan Maret sampai dengan selesai.

### 3.5 Metode Pengujian Data

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berikut adalah metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengujian Asumsi Klasik

Di dalam penggunaan analisis linear berganda, diperlukan beberapa pengujian asumsi klasik. Beberapa asumsi klasik regresi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Linear Regression*) sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti terdiri atas:

a. Uji Normalitas

Menurut Husein Umar (2011:182) mendefinisikan uji normalitas sebagai berikut: “Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak”. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak.

a. Uji Multikolinearitas

Menurut Husein Umar (2011:177) mendefinisikan uji multikolinieritas sebagai berikut: “Multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen”.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Husein Umar (2011:179) mendefinisikan uji heteroskedastisitas sebagai berikut: “Heteroskedastisitas adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain”.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011:110).

### 3.6 Metode Analisis Data

1. Rancangan Analisis

Analisis yang penulis gunakan terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode analisis deskriptif (kualitatif) dan verifikatif (kuantitatif) dengan pendekatan kuantitatif.

Adapun langkah-langkah analisis kuantitatif yang diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun pengertian analisis regresi linear berganda menurut Menurut Sugiyono (2011:277) sebagai berikut: “Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya)”.

Persamaan analisis regresi linier berganda secara umum untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1\ X1 + \beta 2\ X2$$

Sumber: Sugiyono 2012

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

α = konstanta, merupakan nilai terikat yang dalam hal ini adalah Y pada saat variabel bebasnya adalah 0 (X1, X2= 0)
β1 = koefisien regresi berganda antara variabel bebas X1 terikat Y, apabila variabel bebas X2 diangap konstan.
β2 = koefisien regresi berganda antara variabel bebas X2 terikat Y, apabila variabel bebas X1 diangap konstan.
X1 = Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
X2 = Pemeriksaan Pajak

2) Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen.

3) Analisis Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X1) dan Pemeriksaan Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) dapat diketahui dengan menggunakan analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya yaitu:

**KD = r² x 100%**

Sumber : Umi Narimawati (2010:50)

Keterangan:
KD = Koefisien Determinasi
$r^2$ = Kuadrat Koefisien Korelasi
100% = Pengkali yang menyatakan dalam persentase

**KD = beta x zero order x 100%**

**(Sumber : Gujarati, 2003:172)**

Keterangan:
Beta = Nilai Beta
*Zero order* = Nilai *Zero Order*

2. Metode Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Adapun langkah- langkah pengujiannya sebagai berikut:

1. Pengujian Secara Parsial

Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan dari variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), selanjutnya pengujian dilakukan dengan menggunakan uji statistik t sebagai berikut:

a. Rumus uji t yang digunakan adalah:

Hasilnya bandingkan dengan tabel t untuk derajat bebas n-k-1 dengan taraf signifikansi 5%.

b. Hipotesis

$H_{01}$ ; ρ = 0, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

$H_{11}$ ; ρ ≠ 0, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

$H_{02}$ ; ρ = 0, Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

$H_{12}$ ; ρ ≠ 0, Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

c. Menentukan tingkat signifikan.

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = (n-k-1), untuk menentukan t tabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.

d. Menentukan kesimpulan berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t tabel. H0 ditolak apabila t hitung> t tabel (α = 0,05).

Kriteria penarikan pengujian: Jika menggunakan tingkat kekeliruan (α=0,01) untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

1) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka $H_0$ ada didaerah penolakan, berarti $H_a$ diterima artinya antara variabel bebas dan variabel terikat ada hubungannya.
2) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka $H_0$ ada didaerah penerimaan, berarti $H_a$ ditolak artinya antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada hubungannya.

2. Penarikan Kesimpulan Hipotesis

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan dan berlaku sebaliknya. Jika t hitung jatuh di daerah penolakan (penerimaan) maka $H_o$ ditolak (diterima) dan $H_a$ diterima (ditolak). Artinya koefisien regresi signifikan (tidak signifikan). Kesimpulannya, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pemeriksaan Pajak mempengaruhi (tidak mempengaruhi) Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Tingkat signifikannya yaitu 5% (α = 0,05) artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima) dengan taraf kepercayaan 95% maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya (tidak adanya pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut). Dalam hal ini ditunjukkan dengan penolakan $H_O$ atau penerimaan alternatif ($H_a$).

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menjelaskan pengaruh yang diberikan oleh variabel penagihan pajak dengan surat paksa dan variabel pemeriksaan pajak terhadap variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mana masing-masing variabel bebas dan terikat yang diteliti diambil dari data masing-masing indikator variabel tiap bulannya selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

#### 4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya selama 5 periode, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

##### 4.1.1.1 Deskriptif Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Berikut ini adalah data perkembangan penagihan pajak dengan surat paksa per bulan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya berdasarkan nilai nominal surat paksa periode tahun 2010-2014 (Gambar 4.1 Perkembangan Penagihan Pajak Periode Tahun 2010-2014), dari gambar tersebut diketahui bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2012 meningkat sebesar 167,753% namun pada tahun 2012 sampai 2013 terjadi penurunan mencapai 267,753% dan kembali meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2014.

##### 4.1.1.2 Deskriptif Pemeriksaan Pajak

Berikut ini adalah data perkembangan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan nilai nominal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diperoleh periode tahun 2010-2014 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya (Gambar 4.2 Perkembangan Pemeriksaan Pajak Periode Tahun 2010-2014), dari gambar tersebut diketahui bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan sedangkan dari tahun 2012 hingga tahun 2014 cenderung mengalami penurunan.

##### 4.1.1.3 Deskriptif Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berikut ini adalah gambaran mengenai Perkembangan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya (Gambar 4.3 Perkembangan Penerimaan PPN Periode Tahun 2010-2014), dari tahun 2011 sampai tahun 2014 cenderung mengalami penurunan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, namun sempat terjadi peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 mencapai 22,91%.

#### 4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambaan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Majalaya periode tahun 2010-2014, maka dilakukan analisis regresi linier berganda yang terdiri dari analisis korelasi, analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi.

#### 4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan model regresi tidak bias atau model regresi *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) pada analisis regresi linier berganda, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Adapun keempat uji asumsi klasik itu adalah:

**1. Uji Normalitas**

Dari hasil pengujian normalitas data yang disajikan pada Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data Residual, terlihat bahwa nilai probabilitas (sig) variabel residual sebesar 0,790 > 0,05 yang menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki sebaran yang normal. Dengan kata lain asumsi normalitas data terpenuhi.

**2. Uji Multikolinieritas**

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas menunjukkan hasil pengujian multikolinieritas data, terlihat bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh kedua variabel bebas masing-masing sebesar 0,999 > 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya korelasi yang kuat di antara variabel bebas, sehingga asumsi tidak terjadi multikolinieritas data terpenuhi.

**3. Uji Heteroskedastisitas**

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas, terlihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh masing-masing variabel bebas > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *variance residual* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain bersifat homokedastisitas.

**4. Uji Autokorelasi**

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi menjelaskan hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan metode Durbin Watson. Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai Durbin Watson yang diperoleh sebesar 0,820. Nilai tersebut berada diantara -2 dan 2. Sesuai dengan kriteria pengujian dapat dikatakan bahwa data yang digunakan tidak memiliki masalah autokorelasi, baik itu autokorelasi positif ataupun autokorelasi negatif. Dari keempat pengujian asumsi klasik di atas, tidak ditemukan adanya pelanggaran asumsi klasik, sehingga analisis regresi linier berganda bisa digunakan.

#### 4.1.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Dari tabel *output* (Tabel 4.9 Persamaan Regresi Linier Berganda) diperoleh nilai a sebesar 22,651, $\beta_1$ sebesar 0,001 dan $\beta_2$ sebesar 0,001. Dengan demikian, persamaan regresi linear berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y= 22{,}651 + 0{,}001X_1 + 0{,}001X_2$$

#### 4.1.2.3 Analisis Korelasi

Berdasarkan Tabel 4.11 Hasil Analisis Korelasi Parsial, nilai korelasi parsial dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- **Hubungan Antara Penagihan Pajak ($X_1$) dengan Penerimaan PPN (Y)**

Nilai korelasi yang diperoleh antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan PPN adalah sebesar 0,370. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah positif/searah. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 0,370 termasuk kedalam kategori hubungan yang rendah, berada dalam kelas interval antara 0,20 – 0,399.

- **Hubungan Antara Pemeriksaan Pajak ($X_2$) dengan Penerimaan PPN (Y)**

Nilai korelasi yang diperoleh antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan PPN adalah sebesar 0,310. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi

sebesar 0,310 termasuk kedalam kategori hubungan yang rendah, berada dalam kelas interval antara 0,20 – 0,399.

**4.1.2.4 Koefisien Determinasi**

Koefisien Determinasi (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (R) atau disebut juga sebagai *R-Square*. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dan pemeriksaan pajak dengan penerimaan PPN.

Berdasarkan Tabel 4.12 Koefisien Determinasi Simultan, diperoleh informasi bahwa nilai koefisien korelasi atau (R) yang diperoleh sebesar 0,490. Dengan demikian koefisien determinasi dapat dihitung sebagai berikut:

KD = $(0{,}490)^2$ x 100 %

KD = 24%

Dari hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 24%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yang terdiri dari penagihan pajak dengan surat paksa dan pemeriksaan pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan PPN pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya sebesar 24%, sedangkan 76% lainnya merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. Untuk melihat besar kontribusi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

**KD = beta x zero-order x 100%**

Berdasarkan *output* pada Tabel 4.13 Koefisien Determinasi Parsial, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

**KD atau Pengaruh $X_1$ terhadap Y = 0,380 x 0,370 = 0,141 atau 14%**

**KD atau Pengaruh $X_2$ terhadap Y = 0,322 x 0,310 = 0,100 atau 10%**

Dari perhitungan di atas, terlihat bahwa penagihan pajak ($X_1$) memberikan kontribusi paling dominan terhadap penerimaan PPN (Y) dengan kontribusi yang diberikan sebesar 14%, sedangkan 86% sisanya diberikan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sedangkan variabel pemeriksaan pajak ($X_2$) memberikan kontribusi terhadap penerimaan PPN (Y) sebesar 10%, sedangkan 90% sisanya diberikan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

**4.1.2.5 Pengujian Hipotesis**

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut:

**1. Pengujian Hipotesis Parsial $X_1$**

Berdasarkan Tabel 4.14 Pengujian Hipotesis Parsial $X_1$, diketahui bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variabel $X_1$ sebesar 3,287. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df= n-k-1= 60-2-1= 57, diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar ±2,002. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 3,287, berada diluar nilai t-tabel (-2,002 dan 2,002). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima, artinya secara parsial penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN pada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode tahun 2010 – 2014.

**2. Pengujian Hipotesis Parsial $X_2$**

Berdasarkan Tabel 4.15 Pengujian Hipotesis Parsial $X_2$, diketahui bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variabel $X_2$ sebesar 2,786. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k=60-3= 57, diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar ±2,002. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh sebesar

2,786, berada diluar nilai t-tabel (-2,002 dan 2,002). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima, artinya secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN pada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode tahun 2010 – 2014.

### 4.2 Pembahasan

Menjelaskan jawaban-jawaban penelitian yang mengacu kepada rumusan masalah. Dimana fenomena yang diangkat pada latar belakang penelitian dapat dijawab dengan melihat pada hasil analisis secara statistik dan hasil analisis deskriptif. Sehingga penelitian dapat menghasilkan gambaran solusi untuk memecahkan masalah berdasarkan pada teori dan penelitian sebelumnya.

#### 4.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0,370 yang tergolong dalam kategori rendah. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan penagihan dengan surat paksa maka hal tersebut akan diikuti pula oleh kenaikan pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan sebaliknya. Besar presentase pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 14%, artinya sebesar 14% Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh penagihan pajak dengan surat paksa, sedangkan sisanya sebesar 86% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari perbandingan $t_{hitung}$ dengan $t_{tabel}$ adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,287 > 2,002), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% $H_0$ ditolak dan $H_1$ diterima yang berarti variabel penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Nilai signifikansi untuk variabel penagihan pajak dengan surat paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 0,002, artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai hanya 0,2% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak $H_0$. Kesimpulannya, penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kesimpulan di atas telah menjawab fenomena yang terjadi, dimana fenomena yang terjadi pada variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut menurun dari target, di sisi lain penagihan pajak dengan surat paksa secara rutin dilakukan oleh petugas pajak, seharusnya menurut teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan agar wajib pajak mau membayar utang pajaknya dengan kata lain dapat menambah penerimaan pajak, fenomena tersebut menggambarkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mempunyai hubungan yang negatif atau berbanding terbalik, namun setelah didapat hasil penelitian ini dapat dibuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai memiliki hubungan yang positif. Di mana ketika penagihan pajak dengan surat paksa mengalami peningkatan maka secara otomatis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami peningkatan pula, begitu pula sebaliknya.

#### 4.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0,310, artinya tingkat pemeriksaan pajak memiliki hubungan rendah dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan pemeriksaan pajak berdasarkan nilai nominal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) maka hal tersebut akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan sebaliknya. Besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10%, yang artinya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak 10%, sedangkan sisanya sebesar 90% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari perbandingan $t_{hitung}$ dengan $t_{tabel}$ adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,786 > 2,002), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% $H_0$ ditolak dan $H_1$ diterima yang berarti variabel

pemeriksaan pajak yang diberikan secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Nilai signifikansi untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,007, artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai hanya 0,7% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak $H_0$. Kesimpulannya, pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kesimpulan di atas telah menjawab fenomena yang terjadi, dimana fenomena yang terjadi pada variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut menurun dari target, di sisi lain pemeriksaan pajak berdasarkan jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) cenderung meningkat, seharusnya menurut teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak mau membayar utang pajaknya yang secara tidak langsung dapat menambah penerimaan pajak dalam hal ini khususnya Pajak Pertambahan Nilai, fenomena tersebut menggambarkan bahwa pemeriksaan pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mempunyai hubungan yang negatif atau berbanding terbalik, namun setelah didapat hasil penelitian ini dapat dibuktikan bahwa pemeriksaan pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai memiliki hubungan yang positif. Dimana ketika pemeriksaan pajak mengalami peningkatan maka secara otomatis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami peningkatan pula, begitu pula sebaliknya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode tahun 2010–2014 dengan kontribusi yang diberikan sebesar 14%.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode tahun 2010–2014 dengan kontribusi yang diberikan sebesar 10%.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Saran Praktis

a. Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya

Diharapkan dengan penelitian ini bisa membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan cara menambah tim pemeriksa khusus dalam memeriksa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dengan demikian akan meminimalisir terjadinya kesalahan pada penetapan hasil pemeriksaan pajak yang akan berujung pada sengketa pajak. Selain itu Pihak instansi disarankan untuk dapat memberikan peringatan apabila wajib pajak badan melakukan perpindahan tempat usaha tanpa melapor terlebih dahulu kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak.

b. Untuk Wajib Pajak

Disarankan kepada wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan, dikarenakan pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara.

2. Saran Akademis (Bagi Peneliti Lain)

Bagi peneliti lain, disarankan untuk menambah indikator ataupun variabel lain, metode yang sama ataupun berbeda tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti saat ini maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

## DAFTAR PUSTAKA


Diaz Priantara.2013. *Fraud Auditing and Investigation*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media

Erly Suandy.2011. *Perencanaan Pajak* Edisi 5. Jakarta: Penerbit Salemba Empat: 34-208.

Gujarati Damodar.2003. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga: 172.

Ilyas, Wirawan dan Rudy Suhartono.2012. *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media: 53.

Imam Ghozali.2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro: 110.

Mardiasmo.2013. *Perpajakan* Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi: 121.

Siti Kurnia Rahayu.2010. *Perpajakan Indonesia*: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu: 248.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati.2010. *Perpajakan Indonesia*: Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Resmi.2012. *Perpajakan*: Teori dan Kasus, Edisi: 6 Jilid 2 Jakarta: Salemba Empat: 5.

Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta: 2-137.

Sugiyono.2013a. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND* cetakan ke-19. Bandung: Alfabeta: 8-224.

Sugiyono.2013b. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta

Suprianto, Edy.2011. *Akuntansi Perpajakan.* Yogyakarta: Graha Ilmu: 16.

Thomas Sumarsan.2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Indeks: 68.

Umi Narimawati.2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Penerbit Ganesis: 21-50.

Untung Sukardji.2014. *Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia* (Edisi Revisi 2014) Cetakan Ke-9. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada

Waluyo.2013. *Perpajakan Indonesia* Edisi 11. Jakarta selatan: Salemba Empat Jagakarsa: 238.

**Undang-Undang dan Peraturan:**

_____, *Undang – Undang 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. 2009. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

**Jurnal:**

Hazra Muda, dkk. 2015. *Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dampaknya terhadap Penerimaan PPN: Studi Empiris pada KPP Pratama Bitung*. Jurnal EMBA. ISSN 2303-1174 Vol.3 (No.4) 1-12

Rohmasari Sitio. 2015. *Pengaruh Self Assessment System, Penerbitan STP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan PPN: Studi Empiris pada KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru*. Jurnal FEKON. Vol. 2 (No. 2) 1-15

**Media *On-line*:**

Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati. 2015. "*Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak pada Penerimaan PPN: Studi Empiris pada KPP Pratama Badung Utara"*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556 13.1. E-Jurnal On-line. Melalui https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje8MTZvo_MAhXMJ5QKHdIQC_MQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fojs.unud.ac.id%2Findex.php%2FAkuntansi%2Farticle%2Fdownload%2F13012%2F10723&usg=AFQjCNFvMApXB54DgIYn4kzMBWsgd7njiw&sig2=xNGw32Ctn-WPeV5Fuu-l7Q> (Diakses pada tanggal 2 Maret 2016)

Gentur Putro Jati. 2015. "*Dirjen Pajak Bongkar Alasan Penurunan Penerimaan sampai April*" (on-line). Melalui

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150506154033-78-51602/dirjen-pajak-bongkar-alasan-penurunan-penerimaan-sampai-april/> (Diakses pada tanggal 8 Maret 2016)

Fiki Ariyanti. 2015. "Penerimaan Pajak Rendah, Ini Strategi Menkeu Buat Dongkrak"(on-line). Melalui<http://bisnis.liputan6.com/read/2288547/penerimaan-pajak-rendah-ini-strategi-menkeu-buat-dongkrak> (Diakses pada tanggal 8 Maret 2016)

Kurniawan. 2015. "Pemerintah Janjikan Batasi Denda Bunga Utang Pajak Maksimal 48%" (on-line). Melalui <http://finansial.bisnis.com/read/20150815/10/462884/pemerintah-janjikan-batasi-denda-bunga-utang-pajak-maksimal-48> (Diakses pada tanggal 9 Maret 2016)

DJP Kemenkeu. 2012. "Dirjen Pajak: Penerimaan Pajak 2011 Capai 99,3 Persen" (on-line). Melalui <http://www.pajak.go.id/content/dirjen-pajak-penerimaan-pajak-2011-capai-993-persen> (Diakses pada tanggal 27 April 2016)

**LAMPIRAN**

**Tabel 3.1**
**Operasionalisasi Variabel**

| Variabel | Konsep Variabel | Dimensi | Indikator | Skala |
|---|---|---|---|---|
| **Variabel X1: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**<br><br>UU Nomor 19 Tahun 2000, Siti Kurnia Rahayu (2010), Sumarsan (2012) | Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita Sumarsan (2012). | Penagihan setelah jatuh tempo Surat Teguran | Jumlah Nominal Surat Paksa yang terbit<br><br>Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak<br><br>Erly Suandy (2011), Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010). | Rasio |
| **Variabel X2: Pemeriksaan Pajak**<br><br>17/PMK.03/2013, Siti Kurnia Rahayu (2010), Diaz Priantara (2013) | Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan Diaz Priantara (2013). | Produk Hukum /Hasil Pemeriksaan | Jumlah Nominal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang terbit<br><br>SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar oleh wajib pajak<br>Siti Kurnia Rahayu (2010), Rudy Suhartono dan wirawan B.Ilyas (2012). | Rasio |

| Variabel | Konsep Variabel | Dimensi | Indikator | Skala |
|---|---|---|---|---|
| **Variabel Y: Penerimaan PPN**<br><br>Sukardji (2014), Djuanda dan Irwansyah Lubis (2011), Suprianto (2011) | Pajak tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkatan penyerahan jasa kena pajak (*multi stage levy*) Djuanda dan Lubis (2011). | Penerimaan Pajak | Jumlah Realisasi Penerimaan PPN<br><br>Pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak atas penjualan/pembelian barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi<br>Siti Kurnia Rahayu (2010), Resmi (2011), Suprianto (2011). | Rasio |



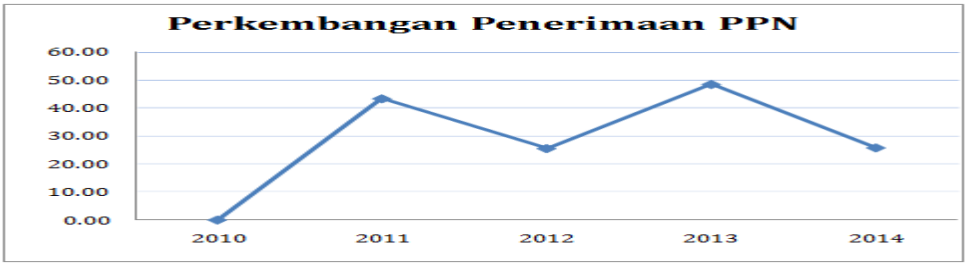

**Gambar 4.1**

**Perkembangan Penagihan Pajak Periode Tahun 2010 – 2014**




**Gambar 4.2**

**Perkembangan Pemeriksaan Pajak Periode Tahun 2010 – 2014**




**Gambar 4.3**
**Perkembangan Penerimaan PPN Periode Tahun 2010 – 2014**

**Tabel 4.5**
**Hasil Uji Normalitas Data Residual**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 60 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .56704237 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .084 |
| | Positive | .059 |
| | Negative | -.084 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .651 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .790 |

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

**Tabel 4.6**
**Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients[a]**

| Model | | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | Penagihan Pajak | .999 | 1.001 |
| | Pemeriksaan Pajak | .999 | 1.001 |

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

**Tabel 4.7**
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | .453 | .047 | | 9.676 | .000 |
| | Penagihan Pajak | -4.611E-005 | .000 | -.022 | -.166 | .868 |
| | Pemeriksaan Pajak | .000 | .000 | -.129 | -.985 | .329 |

a. Dependent Variable: Abs

**Tabel 4.8**
**Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary[b]**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .490[a] | .240 | .214 | .57690 | .820 |

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

**Tabel 4.9**
**Persamaan Regresi Linier Berganda**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 22.651 | .077 | | 294.577 | .000 |
| | Penagihan Pajak | .001 | .000 | .380 | 3.287 | .002 |
| | Pemeriksaan Pajak | .001 | .000 | .322 | 2.786 | .007 |

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

**Tabel 4.11**
**Hasil Analisis Korelasi Parsial**

**Correlations**

| | | Penerimaan PPN |
|---|---|---|
| Penagihan Pajak | Pearson Correlation | .370 |
| | Sig. (2-tailed) | .004 |
| | N | 60 |
| Pemeriksaan Pajak | Pearson Correlation | .310 |
| | Sig. (2-tailed) | .016 |
| | N | 60 |

**Tabel 4.12**
**Koefisien Determinasi Simultan**

**Model Summary[b]**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .490[a] | .240 | .214 | .57690 |

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

**Tabel 4.13**
**Koefisien Determinasi Parsial**

**Coefficients[a]**

| Model | | Standardized Coefficients | Correlations |
|---|---|---|---|
| | | Beta | Zero-order |
| 1 | Penagihan Pajak | .380 | .370 |
| | Pemeriksaan Pajak | .322 | .310 |

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

**Tabel 4.14**
**Pengujian Hipotesis Parsial $X_1$**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 22.651 | .077 | | 294.577 | .000 |
| | Penagihan Pajak | .001 | .000 | .380 | 3.287 | .002 |
| | Pemeriksaan Pajak | .001 | .000 | .322 | 2.786 | .007 |

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN